



Integrasi Literasi dan Digitalisasi Keuangan dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah: Analisis Kualitatif Berbasis ATLAS.ti terhadap Peningkatan Kinerja dan Pendapatan Asli Desa melalui BUMDes di Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

Syamsiah
Prodi Bisnis Digital ITBA Al gazali Barru
syamsiah@algazali.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi literasi keuangan dan digitalisasi keuangan dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kinerja dan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera di Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait. Data kualitatif yang diperoleh dianalisis menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti melalui proses pengodean, kategorisasi, dan penemuan tema-tema utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pencatatan dan pelaporan keuangan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Literasi keuangan pengelola berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan usaha yang rasional dan berkelanjutan. Selain itu, kejelasan struktur organisasi, penerapan SOP berbasis teknologi, serta keterlibatan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa memperkuat kinerja BUMDes dan kepercayaan publik. Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya manusia di bidang keuangan digital masih menjadi kendala utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi literasi dan digitalisasi keuangan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja BUMDes dan PADes, serta dapat menjadi model pengelolaan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMDes; Literasi Keuangan; Digitalisasi Keuangan; Pendapatan; Desa; ATLAS.ti

A.PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi desa merupakan bagian strategis dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan antarwilayah di Indonesia. Desa tidak lagi diposisikan semata sebagai unit administratif, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan mengelola potensi ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kehadiran BUMDes diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memperkuat kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan (Irawan et al., 2025). Namun demikian, efektivitas pengelolaan BUMDes masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kapasitas sumber daya manusia.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja BUMDes adalah tingkat literasi keuangan pengelola dan masyarakat desa. Literasi keuangan mencakup pemahaman mengenai perencanaan, pengelolaan, serta pengambilan keputusan keuangan yang rasional dan bertanggung jawab. Rendahnya literasi keuangan menyebabkan pengelolaan BUMDes cenderung tidak optimal, terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan pengembangan usaha produktif (Irawan et al., 2025). Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi prasyarat utama dalam memperkuat peran BUMDes sebagai motor ekonomi desa.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, digitalisasi keuangan menjadi agenda penting dalam kebijakan pembangunan nasional, termasuk di wilayah pedesaan. Digitalisasi keuangan memungkinkan proses transaksi, pencatatan, dan pelaporan keuangan dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian Ningsih dan Yolanda (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan di wilayah pedesaan, meskipun implementasinya masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kapasitas digital masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan BUMDes, digitalisasi keuangan berpotensi meningkatkan kinerja organisasi melalui penguatan sistem administrasi dan pengendalian keuangan. Anisa et al. (2025) menegaskan bahwa penerapan sistem keuangan digital pada BUMDes mampu memperbaiki kualitas laporan keuangan dan mendukung pengambilan keputusan manajerial yang

lebih akurat. Namun, tanpa dukungan literasi keuangan dan literasi digital yang memadai, pemanfaatan teknologi digital justru berisiko tidak berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia secara berkelanjutan mendorong integrasi tata kelola keuangan desa berbasis digital sebagai upaya meningkatkan transparansi publik. Penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan desa diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran desa. Model tata kelola keuangan desa berbasis digital juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan desa (Udayat & Kusmiati, 2025). Selain itu, partisipasi publik dalam pengawasan keuangan desa semakin terbuka seiring agenda transformasi menuju smart village dan ekonomi digital inklusif.

Integrasi antara literasi keuangan dan digitalisasi keuangan menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja BUMDes dan kontribusinya terhadap PADes. Studi Dewi dan Yasa (2025) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes meningkat secara signifikan ketika digitalisasi didukung oleh pemahaman keuangan yang baik dari pengelola. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi dan digitalisasi bukanlah dua aspek yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam praktik tata kelola ekonomi desa.

Untuk memahami proses integrasi literasi dan digitalisasi keuangan secara komprehensif, pendekatan penelitian kualitatif dipandang paling relevan untuk digunakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, proses, serta konteks sosial yang melatarbelakangi implementasi kebijakan pemerintah di tingkat desa. Penggunaan perangkat lunak analisis kualitatif seperti ATLAS.ti mempermudah identifikasi pola, tema, serta relasi antaraktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Akhmadi et al. (2023) menegaskan bahwa pendekatan ini efektif dalam analisis kebijakan publik di tingkat lokal. Dengan demikian, dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan BUMDes dapat dipahami secara lebih mendalam dan sistematis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dengan tujuan menganalisis integrasi literasi dan digitalisasi keuangan dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kinerja dan PADes melalui BUMDes. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kebijakan dan model

pengelolaan BUMDes yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan bagi desa-desa lain dengan karakteristik serupa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru sebagai lokasi kajian penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi literasi dan digitalisasi keuangan dalam implementasi kebijakan pemerintah di tingkat desa. Fokus kajian diarahkan pada peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris sebagai rujukan kebijakan dan model pengelolaan BUMDes yang berkelanjutan.

B.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam integrasi literasi dan digitalisasi keuangan dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kinerja dan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, serta dinamika sosial yang terjadi dalam praktik pengelolaan BUMDes, khususnya terkait adaptasi terhadap sistem keuangan digital dan tingkat literasi keuangan pengelolanya. Fokus penelitian diarahkan pada BUMDes Sejahtera di Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai unit analisis utama yang merepresentasikan implementasi kebijakan ekonomi desa berbasis digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi lapangan, dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan secara purposive terhadap informan kunci, yaitu pengelola BUMDes, aparat pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pemangku kepentingan terkait yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan BUMDes. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran empiris terkait penerapan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis digital, sementara dokumentasi meliputi laporan keuangan, standar operasional prosedur (SOP), serta kebijakan desa yang relevan. Strategi ini digunakan untuk memastikan kedalaman dan keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik.

Data kualitatif yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti dengan tahapan pengodean terbuka (open coding), pengelompokan kategori (axial coding), dan penarikan tema utama (selective coding). Analisis difokuskan pada hubungan antara literasi keuangan, digitalisasi sistem keuangan, implementasi kebijakan desa, serta dampaknya terhadap kinerja BUMDes dan PADes. Temuan penelitian diinterpretasikan secara kontekstual untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai model pengelolaan BUMDes yang adaptif dan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan bahwa “integrasi literasi dan digitalisasi keuangan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja BUMDes dan Pendapatan Asli Desa” Literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi digital merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga ekonomi, karena mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan keuangan yang lebih rasional dan berkelanjutan (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2018).



Gambar 1 Kerangka Pikir Hubungan Antara Literasi Keuangan Dan Digitalisasi

Gambar kerangka pikir penelitian ini menggambarkan alur konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara literasi keuangan dan digitalisasi keuangan sebagai faktor input utama dalam implementasi kebijakan pemerintah di tingkat desa. Literasi keuangan mencakup aspek edukasi

keuangan, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan usaha, sementara digitalisasi keuangan meliputi penerapan sistem keuangan digital, penggunaan aplikasi dan SOP berbasis teknologi, serta transparansi data. Kedua faktor tersebut saling berinteraksi dan menjadi landasan penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan BUMDes.

Implementasi kebijakan pemerintah yang didukung oleh literasi dan digitalisasi keuangan berdampak langsung pada peningkatan kinerja BUMDes Sejahtera di Desa Batupute, yang ditunjukkan melalui peningkatan efisiensi usaha dan akuntabilitas pengelolaan. Peningkatan kinerja tersebut kemudian berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui optimalisasi pendapatan usaha dan kontribusi BUMDes terhadap keuangan desa. Secara keseluruhan, kerangka pikir ini menegaskan bahwa integrasi literasi dan digitalisasi keuangan merupakan prasyarat strategis dalam mewujudkan pengelolaan ekonomi desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

➤ Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Batupute tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kapasitas kelembagaan desa, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera. Rendahnya PADes selama ini disebabkan belum optimalnya pemanfaatan potensi desa, seperti Pantai Lasonrai, Pelabuhan Laut Awerange, serta keterlibatan pihak swasta (PT LPN) yang belum memberikan kontribusi retribusi secara langsung kepada desa.

Dalam konteks tersebut, BUMDes Sejahtera berperan sebagai instrumen utama pemerintah desa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan BUMDes semata, tetapi sangat bergantung pada kejelasan regulasi yang mendukung pelaksanaannya. Selain itu, kapasitas pengelola BUMDes menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Integrasi literasi keuangan dan digitalisasi keuangan juga menjadi bagian dari

inovasi pengelolaan usaha desa yang semakin dibutuhkan. Penerapan sistem pengelolaan berbasis digital diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan BUMDes. Analisis data kualitatif berbasis ATLAS.ti menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dapat dipahami secara komprehensif melalui beberapa indikator utama. Indikator tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap implementor, serta struktur birokrasi. Keempat indikator ini saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan peningkatan PADes melalui BUMDes Sejahtera.

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui BUMDes Sejahtera

a. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi telah berjalan cukup efektif dalam implementasi kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Batupute. Pemerintah desa secara aktif membangun komunikasi dengan pengelola BUMDes, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat sebagai bagian dari upaya menyinergikan kebijakan dan pelaksanaannya. Komunikasi yang dilakukan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga berlangsung secara dialogis dan partisipatif. Melalui pola komunikasi tersebut, pemerintah desa berupaya memastikan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan dapat dipahami oleh seluruh pihak terkait. Kondisi ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan program. Selain itu, komunikasi yang efektif mampu membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes. Dengan demikian, komunikasi menjadi faktor penting dalam mendorong BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Pernyataan Kepala Desa Batupute, Jaharuddin, menegaskan bahwa pemerintah desa memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan BUMDes sebagai instrumen peningkatan PADes. Dukungan tersebut diwujudkan melalui komunikasi kebijakan yang intensif serta pemberian modal usaha dari dana desa. Kepala desa juga menekankan bahwa hasil pengelolaan BUMDes diharapkan dapat kembali dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan sosial dan pembangunan sarana prasarana desa. Realisasi PADes yang mencapai lebih dari Rp30.000.000,00 menunjukkan adanya dampak positif dari komunikasi kebijakan yang dijalankan. Capaian tersebut

menjadi indikator bahwa pengelola BUMDes telah memahami arah dan tujuan kebijakan pemerintah desa. Dengan adanya komunikasi yang jelas, pengelola memiliki pedoman dalam menjalankan program usaha. Hal ini memperkuat peran BUMDes dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa.

Lebih lanjut, isi komunikasi yang disampaikan oleh aparat desa dan pengelola BUMDes berfokus pada perencanaan program kerja serta pengembangan unit usaha desa. Pembahasan juga mencakup pengajuan proposal usaha sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengalokasian anggaran. Program unggulan desa dirancang secara bersama-sama agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Dalam konteks integrasi literasi dan digitalisasi keuangan, komunikasi ini berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan dan pemahaman. Aparat desa mendorong pengelola BUMDes untuk menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penggunaan teknologi digital mulai diperkenalkan sebagai bagian dari inovasi pengelolaan usaha. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga membangun kapasitas pengelola BUMDes secara berkelanjutan.

b. Sumber Daya

Dari aspek sumber daya, hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Sejahtera masih menghadapi berbagai keterbatasan, khususnya pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Keterbatasan tersebut terlihat dari minimnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi, administrasi, dan pengelolaan keuangan berbasis digital. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pengelolaan keuangan BUMDes secara profesional. Selain itu, rendahnya literasi keuangan sebagian pengelola menjadi tantangan dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial menjadi semakin mendesak. Hal ini seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dalam pengelolaan usaha desa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan BUMDes. Dengan sumber daya yang memadai, BUMDes diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan.

Meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, kondisi tersebut tidak sepenuhnya menghambat kinerja BUMDes Sejahtera. BUMDes ini justru dinilai sebagai salah satu

BUMDes yang cukup berkembang di Kabupaten Barru dibandingkan dengan BUMDes lainnya. Capaian Pendapatan Asli Desa (PADes) sekitar Rp 31.000.000,00 pada tahun 2023 menjadi indikator keberhasilan pengelolaan usaha desa. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal oleh pengelola BUMDes. Komitmen dan kerja sama antar pengurus menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian tersebut. Namun demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap diperlukan untuk menghadapi tantangan ke depan. Upaya pelatihan dan pendampingan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas pengelola. Dengan demikian, kinerja BUMDes dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Integrasi literasi keuangan dan digitalisasi keuangan menjadi kebutuhan strategis dalam pengelolaan BUMDes Sejahtera di masa mendatang. Penerapan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional BUMDes. Selain itu, digitalisasi keuangan dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas usaha desa. Literasi keuangan yang baik juga membantu pengelola dalam mengambil keputusan usaha secara lebih tepat dan terukur. Kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa dapat meningkat apabila pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan melalui pelatihan dan pendampingan menjadi sangat penting. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja BUMDes. Dengan integrasi literasi dan digitalisasi, BUMDes diharapkan mampu berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan PADes.

c. Disposisi (Sikap Implementor)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi atau sikap para implementor kebijakan, baik pengelola maupun pengawas BUMDes Sejahtera, tergolong sangat baik. Sikap yang ditunjukkan tercermin dari adanya komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan usaha desa. Selain itu, kejujuran menjadi nilai utama yang dijunjung oleh pengelola dalam mengelola keuangan dan pelayanan BUMDes. Orientasi pelayanan kepada masyarakat juga terlihat dari upaya memberikan layanan yang ramah dan profesional kepada nasabah. Hingga saat ini, tidak ditemukan adanya keluhan dari masyarakat terkait kualitas pelayanan BUMDes. Kondisi tersebut mencerminkan kuatnya etika pelayanan dalam pengelolaan usaha desa. Sikap positif ini

turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BUMDes. Dengan demikian, disposisi implementor menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan peningkatan PADes.

Disposisi yang positif tersebut menjadi modal sosial yang sangat penting dalam implementasi kebijakan pemerintah melalui BUMDes Sejahtera. Sikap terbuka dan responsif dari para pengelola memudahkan proses koordinasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks digitalisasi keuangan, disposisi yang adaptif menjadi faktor pendukung utama dalam menerima dan menerapkan inovasi. Pengelola BUMDes menunjukkan kesiapan untuk menggunakan sistem pembukuan digital sebagai upaya meningkatkan transparansi keuangan. Selain itu, pemanfaatan layanan keuangan berbasis teknologi mulai diperkenalkan dalam aktivitas usaha desa. Sikap positif ini meminimalkan resistensi terhadap perubahan yang bersifat teknologis. Dengan adanya disposisi yang baik, proses transformasi digital dapat berjalan lebih efektif. Hal ini pada akhirnya mendukung peningkatan kinerja BUMDes secara berkelanjutan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi BUMDes Sejahtera telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Permendesa terkait pengelolaan BUMDes. Struktur organisasi tersebut dirancang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan usaha desa. Unsur struktur birokrasi BUMDes meliputi penasehat atau komisisaris yang dijabat oleh kepala desa. Selain itu, terdapat dewan pengawas yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Direktur BUMDes bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional secara keseluruhan. Struktur ini juga dilengkapi dengan kepala-kepala unit usaha sesuai bidangnya. Unit usaha tersebut mencakup bidang keuangan, multifinance, penjualan, dan pertokoan. Dengan struktur tersebut, pengelolaan BUMDes diharapkan berjalan secara profesional dan terarah.

Struktur birokrasi yang jelas memberikan kejelasan tugas dan fungsi bagi masing-masing pengelola BUMDes Sejahtera. Pembagian peran yang tegas mampu meminimalkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Setiap pengelola memiliki tanggung jawab sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan. Hasil wawancara menunjukkan

bahwa sejauh ini tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam struktur birokrasi BUMDes. Sistem kerja yang ada dinilai telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penambahan sumber daya manusia direncanakan akan dilakukan secara bertahap. Penambahan tersebut disesuaikan dengan perkembangan dan perluasan unit usaha BUMDes. Dengan demikian, struktur birokrasi mampu mendukung keberlangsungan kegiatan usaha desa.

Dalam perspektif integrasi literasi dan digitalisasi keuangan, struktur birokrasi BUMDes Sejahtera menjadi fondasi yang sangat penting. Struktur yang tertata dengan baik memudahkan penerapan sistem Standard Operating Procedures (SOP) secara konsisten. Penerapan SOP berbasis digital memungkinkan pengelolaan keuangan dilakukan secara lebih sistematis dan transparan. Selain itu, sistem digital mendukung proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih akurat. Evaluasi kinerja BUMDes juga dapat dilakukan secara lebih terukur melalui data keuangan yang terdokumentasi dengan baik. Struktur birokrasi yang kuat mempermudah pengawasan internal terhadap kinerja pengelola. Hal ini berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas kelembagaan BUMDes. Dengan demikian, integrasi literasi dan digitalisasi keuangan dapat diimplementasikan secara optimal.

2. Organisasi dan Manajemen BUMDes Sejahtera dalam Perspektif Literasi dan Digitalisasi Keuangan

Organisasi dan manajemen BUMDes Sejahtera di Desa Batupute menunjukkan pola pengelolaan yang semakin adaptif terhadap tuntutan modernisasi tata kelola keuangan desa. Pengelolaan BUMDes tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi mulai diarahkan pada prinsip profesionalisme dan akuntabilitas. Peran penasehat dan dewan pengawas tidak hanya berfungsi sebagai pengendali kebijakan dan pengawasan internal. Selain itu, kedua unsur tersebut juga berperan sebagai fasilitator dalam mendorong peningkatan kapasitas pengelola. Upaya peningkatan literasi keuangan menjadi fokus penting dalam penguatan kelembagaan BUMDes. Pendampingan terhadap pengelola dilakukan agar mampu memahami pengelolaan keuangan secara lebih sistematis. Dengan demikian, organisasi BUMDes mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat desa. Hal ini menjadi dasar bagi pengelolaan usaha desa yang lebih berkelanjutan.

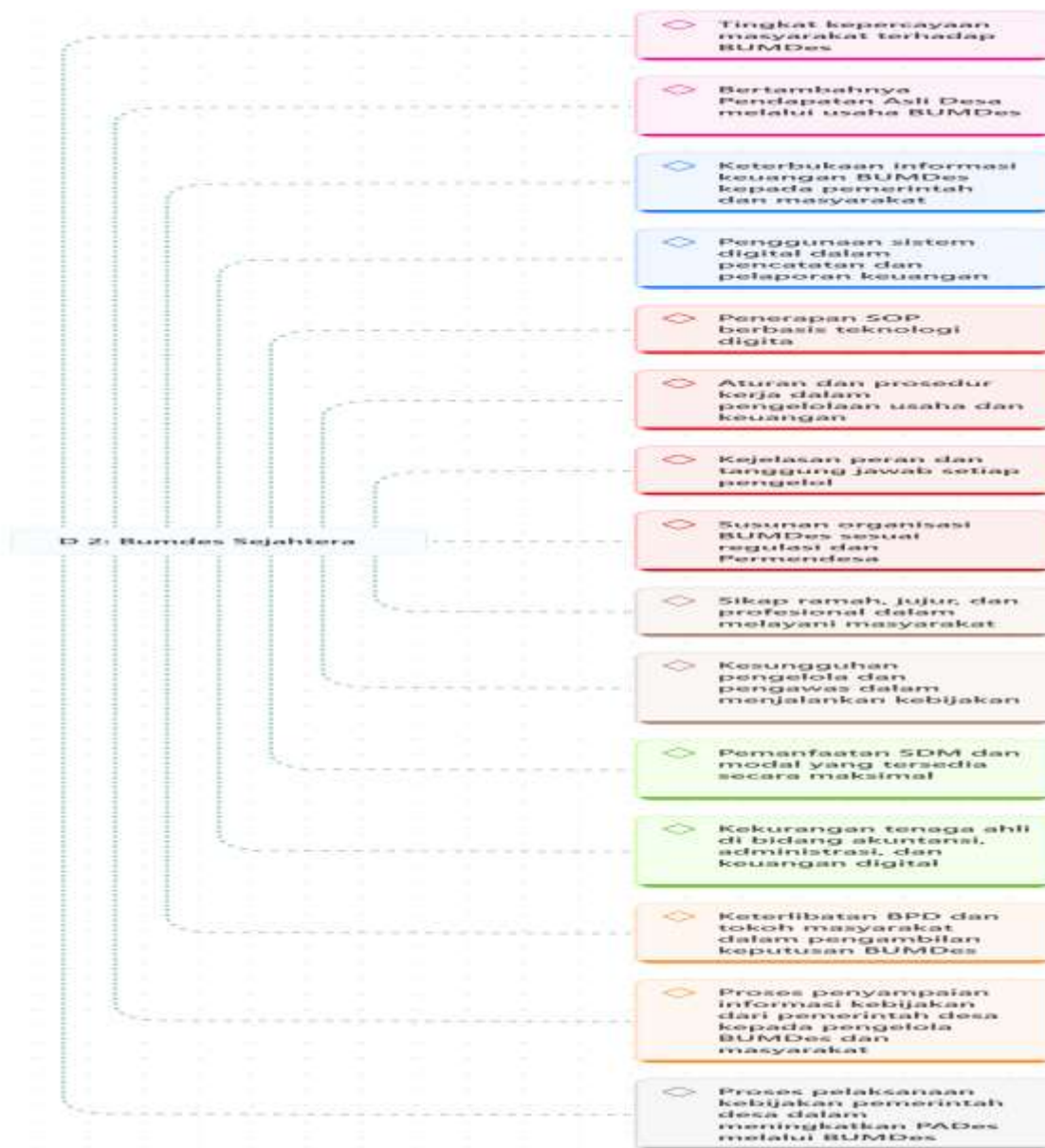
Direktur dan kepala unit usaha menjadi aktor kunci dalam implementasi digitalisasi keuangan pada BUMDes Sejahtera. Peran mereka sangat menentukan dalam pengelolaan pembukuan, transaksi usaha, serta penyusunan laporan keuangan. Digitalisasi keuangan mulai diterapkan untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan pencatatan transaksi. Meskipun demikian, penerapan sistem keuangan digital belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Namun, terdapat komitmen yang kuat dari pemerintah desa untuk terus mendorong penerapan teknologi digital. Integrasi teknologi dipandang sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja kelembagaan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi BUMDes terhadap PADes.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa integrasi literasi dan digitalisasi keuangan memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan pemerintah melalui BUMDes Sejahtera. Integrasi tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja kelembagaan BUMDes secara menyeluruh. Literasi keuangan yang baik membantu pengelola dalam memahami dan mengelola keuangan usaha desa secara tepat. Sementara itu, digitalisasi keuangan mendukung terciptanya sistem pengelolaan yang lebih efisien dan transparan. Kombinasi kedua aspek tersebut mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan usaha desa. Dampaknya terlihat pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa. Dengan demikian, kebijakan pemerintah desa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

➤ Analisis Data Kualitatif Berbasis ATLAS.ti

Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam pengelolaan BUMDes dan implementasi kebijakan keuangan desa. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai praktik literasi keuangan, pemanfaatan digitalisasi keuangan, serta dampaknya terhadap kinerja BUMDes dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Data hasil wawancara tersebut kemudian ditranskripsikan secara verbatim guna menjaga keakuratan informasi dan memudahkan proses analisis lebih lanjut.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan bantuan perangkat lunak ATLAS.ti sebagai alat analisis berbasis komputer untuk mengelola dan menafsirkan data teks secara sistematis. Melalui ATLAS.ti, data hasil wawancara dikodekan, dikategorikan, dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antar konsep yang relevan dengan fokus penelitian. Penggunaan ATLAS.ti memungkinkan peneliti melakukan analisis yang lebih mendalam, transparan, dan terstruktur sehingga meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian.



Gambar 2 Peta tematik hasil analisis kualitatif berbasis ATLAS.ti yang menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BUMDes Sejahtera

Gambar 2 merepresentasikan hasil pemetaan kode (coding) dari data kualitatif wawancara yang dianalisis menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti. Berbagai indikator ditampilkan untuk menunjukkan dimensi tata kelola BUMDes, mulai dari aspek transparansi, digitalisasi keuangan, struktur organisasi, hingga partisipasi masyarakat dan pemerintah desa. Setiap elemen yang ditampilkan mencerminkan tema-tema utama yang muncul dari proses pengodean data, yang saling terhubung dalam satu kerangka analisis kinerja BUMDes Sejahtera.

Gambar tersebut memperlihatkan keterkaitan antara penerapan sistem digital dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, kejelasan aturan dan prosedur kerja, serta profesionalisme pengelola terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat dan bertambahnya PADes melalui usaha BUMDes. Selain faktor pendukung, gambar ini juga menampilkan tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan tenaga ahli di bidang akuntansi dan keuangan digital. Secara keseluruhan, visualisasi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan pemerintah desa dan peran BUMDes dalam mendorong kinerja ekonomi desa secara berkelanjutan.

➤ Pembahasan

Pembahasan ini menunjukkan bahwa integrasi literasi dan digitalisasi keuangan berperan penting dalam meningkatkan kinerja BUMDes Sejahtera di Desa Batupute. Hasil analisis ATLAS.ti mengindikasikan bahwa penggunaan sistem digital dalam pencatatan dan pelaporan keuangan memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes. Kondisi ini mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan usaha BUMDes.

Aspek keterbukaan informasi keuangan menjadi salah satu temuan utama dalam penelitian ini. Informasi keuangan yang dapat diakses oleh pemerintah desa dan masyarakat memperkuat fungsi pengawasan serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan usaha BUMDes. Temuan ini sejalan dengan kebijakan tata kelola keuangan desa berbasis digital yang menekankan prinsip transparansi publik. Melalui digitalisasi, BUMDes mampu menyajikan laporan keuangan yang lebih sistematis dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Selain faktor digitalisasi, literasi keuangan pengelola BUMDes juga memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan usaha. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelola yang memiliki pemahaman keuangan yang memadai lebih mampu mengelola arus kas, menyusun laporan keuangan, serta mengambil keputusan usaha secara rasional. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan digital masih menjadi kendala yang memengaruhi optimalisasi kinerja BUMDes.

Dari sisi kelembagaan, kejelasan struktur organisasi, pembagian peran, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) berbasis teknologi turut memperkuat kinerja BUMDes. Analisis ATLAS.ti memperlihatkan bahwa susunan organisasi yang sesuai regulasi dan adanya koordinasi yang baik antara pengelola, pengawas, dan pemerintah desa mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program BUMDes.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui BUMDes tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah semata, tetapi juga oleh integrasi literasi keuangan, digitalisasi sistem keuangan, dan tata kelola kelembagaan yang baik. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pendampingan berkelanjutan agar implementasi digitalisasi keuangan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan ekonomi desa.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

➤ Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa integrasi literasi keuangan dan digitalisasi keuangan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja BUMDes Sejahtera di Desa Batupute. Penerapan sistem digital dalam pencatatan dan pelaporan keuangan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Literasi keuangan pengelola BUMDes terbukti mendukung pengambilan keputusan usaha yang lebih rasional dan berkelanjutan. Kejelasan

struktur organisasi, SOP berbasis teknologi, serta partisipasi masyarakat turut memperkuat peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui pengelolaan BUMDes.

➤ **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah desa dan pengelola BUMDes meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan literasi keuangan dan keuangan digital secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan pendampingan teknis dalam penerapan sistem keuangan digital agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, penguatan peran BPD dan tokoh masyarakat perlu terus didorong untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji pendekatan kuantitatif atau komparatif untuk memperkuat generalisasi temuan terkait kinerja BUMDes di wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, M. H., Fuady, M. S., & Pribadi, Y. (2023). *The role of village-owned enterprise in fostering financial literacy and digital economy: Case study in Yogyakarta, Indonesia*. Proceedings of the 5th International Public Sector Conference. <https://doi.org/10.4108/eai.10-10-2023.2342197>
- Anisa, A., Handayani, A., & Faozi, K. (2025). Digitalisasi pengelolaan keuangan desa: Analisis implementasi aplikasi keuangan pada BUMDes Bebedahan Berkah. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 5(3), 774–783. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v5i3.8242>
- Dewi, L. T. S., & Yasa, I. N. P. (2025). Mengungkap akuntabilitas penerapan digitalisasi penyusunan laporan keuangan BUMDes. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. <https://doi.org/10.23887/jiah.v15i1.83386>
- Dudi Irawan, Wijaya, G., & Wardoyo, A. E. (2025). Literasi keuangan untuk pengembangan BUMDes dengan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi. *Journal of Humanities Community Empowerment*. <https://doi.org/10.32528/jhce.v1i1.417>
- E-Jurnal Manajemen*, Vol. 14, No. 9. (2025). Digitalisasi juga membuka peluang baru untuk pemberdayaan ekonomi desa.
- Ningsih, R., & Yolanda, Y. (2025). Digitalization of financial services and financial inclusion in rural areas. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.62007/joumi.v3i2.463>

- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *OECD/INFE toolkit for measuring financial literacy and financial inclusion*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/financial/education/financial-literacy>
- Udayat, U., & Kusmiati, M. (2025). Financial governance model village based digital for realize smart and green village. *Digital Innovation: International Journal of Management*. <https://doi.org/10.61132/digitalinnovation.v2i4.600>